

KALANG, PESANGGEM, DAN SEJARAH KAUM MARJINAL DI KAWASAN HUTAN REMBANGⁱ

Oleh: Warto

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret Surakarta

warto_file@yahoo.com

ABSTRACT

Social history is a discourse, which depicts not just the history for political purposes, but also the history of marginal society. This article will describe and analyse the history of Kalang people and Pesanggem who live in Rembang regency in the pre and during the colonialism. Kalang people lived in the forestry area, utilized and depended on forest commodities. They totally have different stereotype compare to Java people. In the colonialism era, the Java Kingdom employed them as loggers, carpenters, craftsmen, and also as soldiers. Nowadays, Kalang people have already extinct, but other argued that the ancient of Samin people is Kalang people. Pesanggem is poor farmer, living near the forest as Kalang, but later they cannot explore the forest resources, and have to deal with Dutch colonialist during the colonial period, and recently to the National Forestry Agency. The Pesanggem is also known as Mbaon people.

Key Words: *Marginal Society, Social History, Kalang, Pesanggem.*

I. PENDAHULUAN

Lahirnya sejarah sosial atau "sejarah alamiah kolektif" merupakan reaksi terhadap dominannya sejarah politik dan orang-orang besar (Neo-Ranke). Dalam tradisi Ranke, yang diperhatikan dalam penulisan sejarah hanyalah puncak-puncak sejarah yaitu orang-orang besar. Pandangan ini mulai ditolak dan melahirkan pandangan lain tentang sejarah, yaitu "ingin mengetahui tidak hanya gugus dan puncak gunung melainkan juga kaki gunungnya, tidak cuma tinggi dan dalamnya daratan melainkan keseluruhan benuanya"². Pada dekade 1920an di Perancis lahir kelompok Annales di bawah Marc Bloch dan Lucien Febvre, yang berusaha menggantikan sejarah politik dengan "sejarah yang lebih luas dan lebih manusiawi", suatu sejarah yang berbicara tentang semua kegiatan manusia dan kurang berminat kepada penceritaan kejadian dibanding kepada analisis "struktur"³.

Berkembangnya sejarah sosial didorong oleh suatu kesadaran untuk "memerhatikan semua bidang kegiatan manusia karena tidak ada bagian kehidupan sosial dapat dipahami secara terpisah dari yang lainnya". Pemikiran seperti inilah yang kemudian melahirkan "New History"⁴ di AS, yaitu sejarah yang berbicara tentang semua kegiatan manusia dan meramu ide-ide dari disiplin antropologi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Sejarah tidak hanya milik mereka yang berkuasa dan orang-orang besar, melainkan juga milik mereka yang selama ini berada di pinggiran kekuasaan atau tidak mempunyai hubungan langsung dengan kekuasaan. Mereka seringkali dianggap "people without history", "voiceless", "subaltern", "the other", "common people", karena dianggap tidak pernah membuat sejarah. Dalam konteks seperti inilah pentingnya menuliskan sejarah dari bawah atau "history from below" sebagai penyeimbang sejarah dari atas yang elitis. Di Indonesia,

penulisan sejarah sosial dengan pendekatan multidimensional telah dirintis oleh Prof. Sartono Kartodirdjo⁵ dan dikembangkan terus oleh para murid-muridnya hingga sekarang.

II. METODE

Tulisan ini berusaha merefleksikan kembali penulisan sejarah kelompok marjinal yang tinggal di kawasan hutan di Karesidenan Rembang.⁶ Sejarah kelompok marjinal ini perlu ditulis bukan hanya dilihat dalam kaitannya dengan kebijakan kehutanan yang membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, melainkan juga untuk mengetahui segala aktivitas yang mereka lakukan secara mandiri tanpa tekanan pihak lain. Dengan kata lain, menulis sejarah sosial masyarakat hutan bukan hanya melihat peran tokoh/elit yang memegang kekuasaan tetapi juga masyarakat kebanyakan. Dengan istilah lain, tidak hanya melihat pohon besar yang menjulang tinggi di hutan, melainkan juga melihat dahan, ranting dan segala isinya yang menghiasi kawasan hutan. Ada dua kelompok masyarakat yang dapat dijadikan contoh untuk menggambarkan sejarah sosial masyarakat marjinal di kawasan hutan Rembang, yaitu *Kalang* dan *Pesanggem*. Kedua golongan sosial ini secara inheren menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur masyarakat desa hutan, baik dilihat dari segi sosiologis, ekonomis, dan kultural. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode deskripsi dan studi pustaka. Deskripsi ditekankan pada kedua kelompok sosial ini yang menjadi bagian penting dari sejarah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan Pantai Utara Jawa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kalang

Sebagai kategori sosial, Kalang mempunyai sejarah panjang, tetapi rekaman historisnya hanya terdengar samar-samar. Sejumlah peneliti telah berusaha menelusuri asal-usul dan perkembangan Kalang sebagai kelompok

diaspora pada beberapa abad yang lalu, sebelum akhirnya sebagian dari mereka menetap di ibukota Kerajaan Mataram sebagai abdi dalem dan sebagian lainnya menjadi kawula biasa. Dalam sejarah Indonesia, Kalang sebagai kategori demografis telah dihapuskan oleh Daendels pada awal abad ke-19, dan semua orang Kalang dimasukkan ke dalam golongan pribumi.

Meskipun demikian, prasangka negatif terhadap kelompok ini masih hidup hingga sekarang. Mereka dianggap "out group" atau "peripatetic", yang hidupnya mengembara dan dianggap memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya: mempunyai ekor, lidahnya bercabang, *toh* di langit-langit mulutnya, dan memiliki daya penciuman yang tajam. Kalang selalu dihubungkan dengan hutan atau pekerjaan yang berkaitan dengan kerajinan kayu dan pertukangan. Setelah mereka berpindah dan tinggal di kota, Kalang mengembangkan jenis pekerjaan yang lebih variatif, yaitu tukang gerobak, tukang kayu, pandai emas, tukang gadai, dan jenis pekerjaan non-pertanian lainnya. Mereka juga masih mempertahankan tradisi lama warisan nenek moyang terutama dalam upacara-upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup, yang masih kental dengan anasir-anasir budaya asli pra-Hindu, serta campuran Hindu dan Islam.

Komunitas *Kalang* adalah bagian dari penduduk Jawa yang diduga selama ratusan tahun pernah hidup dan menyebar di kawasan hutan jati wilayah Rembang dan sekitarnya. Sebelum menetap di suatu tempat, *Kalang* dikenal sebagai kelompok penduduk yang hidupnya berpindah-pindah (*nomad*) dari satu tempat ke tempat lain di kawasan hutan. *Kalang* dikenal sebagai ahli penebang dan tukang kayu yang handal. Di samping itu, *Kalang* juga mengembangkan sub-kultur sendiri yang berbeda dengan penduduk Jawa lainnya. Seperti dikemukakan oleh Graaf, pada zaman VOC dan Pemerintah Hindia Belanda, hutan jati di Rembang mendapatkan perhatian serius, termasuk penduduk yang secara khusus mempunyai

keahlian menebang kayu jati yaitu kaum “*Kalang*”⁷ Selanjutnya Graaf menyebutkan bahwa kaum ‘*Kalang*’ adalah kelompok orang Jawa, yang masih menaati kebiasaan-kebiasaan yang aneh dan giat dalam perhutanan, khususnya di Daerah Rembang. Pada abad ke-17 sudah diberitakan bahwa kaum *Kalang* di daerah-daerah yang banyak hutannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai pemimpin-pemimpin sendiri. Mereka sudah sejak zaman pra-Islam mendiami hutan-hutan dan mengusahakannya.

Keberadaan *Kalang* yang tinggal di kawasan hutan Rembang dapat dilacak kembali pada zaman Hindu di Jawa. Pada waktu itu, *Kalang* di Bojonegoro diizinkan membuka hutan untuk pemukiman baru. Penebangan kayu sebagian besar berlangsung di wilayah Bojonegoro bagian selatan, tetapi tidak diketahui berapa luas hutan jati yang ditebang dan jumlah *Kalang* yang terlibat dalam penebangan. Maka, kemudian terbentuklah desa-desa *Kalang* yang terletak di perbatasan areal hutan jati yang sudah tua usianya. Misalnya, diceritakan, di dekat Desa Kepoh Kidul, tepatnya di Dukuh Ketangi (Bojonegoro) terdapat sebuah tempat yang disebut *Kalangan*, yaitu tempat dimakamkannya Sindu Jaya, tokoh *Kalang* dari zaman Hindu yang “memperoleh kemenangan” atau mencapai kesempurnaan hidup. Altona menyebutkan, *Kalang* mendiami wilayah ini hingga tahun 1625⁸.

Kalang yang tugasnya menebang dan mengangkut kayu jati untuk raja (kerja *blandhong*), dinamakan *Kalang Wadung*, yaitu *Kalang* yang bekerja menggunakan *wadung* (kapak). Kadangkala mereka diolok-olok menjadi “*walang kadung*”, sejenis belalang yang kurus kering, hidupnya berkeliaran. Ini sindiran terhadap cara nomadis *Kalang*.⁹ Peran *Kalang* dalam penebangan hutan di kawasan pantai utara Jawa sangat penting. Veth, misalnya, menyebutkan pada tahun 1675 terdapat sejumlah besar orang *Kalang* yang dipekerjakan untuk menebang kayu di kawasan hutan pegunungan Rembang dan Pati.¹⁰ Daerah pegunungan antara Blora dan Bojonegoro merupakan salah satu pusat

penting pemukiman mereka.¹¹ Di hutan jati wilayah Desa Kawengan (Kedewan, Bojonegoro) dan Tuban terdapat puluhan peninggalan peti kubur batu orang *Kalang*. Peti kubur *Kalang* ini mempunyai persamaan dengan kubur batu yang ditemukan di Gunung Kidul pada 1934. Di dalamnya ditemukan alat-alat dari besi, seperti pahat, kapak persegi, cangkul, sabit, dan lain-lain, yang biasa digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan hutan.¹²

Asal usul *Kalang* seringkali dihubungkan dengan perkawinan antara manusia dan binatang, atau juga perkawinan *incest*. Di Bojonegoro, misalnya, ada folklore yang menceritakan bahwa Raja Giling Wesi (kerajaannya terletak di sebelah barat Bojonegoro-Padangan; kira-kira sekitar Desa Jipang) ternyata kawin dengan anaknya sendiri. Dia menemukan tanda bekas luka di kepala istrinya, yang ternyata adalah anaknya yang pernah dipukul. Sementara itu, cerita yang lain dari Bojonegoro Selatan menyebutkan bahwa Damarwulan, yang tinggal di hutan, bermimpi bertemu dengan seorang wanita. Pada saat berburu, ia didatangi seekor babi hutan, Celeng Srenggi, dan menggodanya. Akhirnya, keduanya kawin dan melahirkan anak perempuan bernama Dewi Wandan Surat. Anak ini semula tidak mempunyai pakaian, dan tubuhnya hanya ditutupi kain lusuh yang dibawa seekor burung yang terbang di atasnya. Setelah besar, anak ini dibawa oleh ibunya menghadap raja Majapahit untuk diakui menjadi anaknya. Ia dapat diterima sebagai anak raja Majapahit apabila ia dapat membuat pakaian yang seluruhnya ditenun tanpa dijahit, yang dilakukan di rumah panggung. Ketika sedang menenun baju, tiba-tiba alat pemintalnya jatuh. Pada saat yang sama, datanglah seekor anjing jantan menolong mengambil alat tenun. Sebagai imbalannya, anjing ini akhirnya dijadikan suami Wandan Surat. Namun, setelah mendengar berita itu justru raja mengusir keduanya. Pada malam hari, keduanya pergi menuju suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon *gebang* atau *tal* (untuk bahan

membuat rumah sederhana dan bahan pakaian untuk orang miskin).

Setelah melakukan perjalanan semalam suntuk, pada pagi hari mereka tiba di wilayah Padangan (Bojonegoro). Tidak lama kemudian istrinya melahirkan seorang anak, tetapi *ari-arnya* tersangkut (*kesangsang*) di pucuk pohon. Anak ini kemudian diberi nama Pangeran Ario Penangsang yang di kemudian hari menjadi penguasa di Jipang sekitar tahun 1560. Cerita itu menjelaskan asal usul Ario Penangsang melalui kata *sangsang*. Setelah melahirkan Penangsang, anjing dan isterinya pergi ke Bogor atau *talkerep* di dekat Babad, dan sekali lagi melahirkan anak bernama Jaka Sona, yang menjadi nenek moyang orang *Kalang*. Jadi, Penangsang mempunyai hubungan persaudaraan dengan Jaka Sona.

Pada zaman Hindu, orang *Kalang* di Bojonegara diizinkan membuka hutan untuk pemukiman baru. Sejak itu terbentuklah desa-desa *Kalang* yang terletak di perbatasan areal hutan jati yang sudah tua. Pada waktu itu peran orang *Kalang* cukup terkenal, terutama dalam penanaman jati. Di dekat desa Kepohkidul, tepatnya di dukuh Ketangi, terdapat tempat yang disebut *Kalangan*, yaitu tempat dimakamkannya Sindu Jaya, orang *Kalang* dari zaman Hindu yang “memperoleh kemenangan” (*zegepralende*) atau mencapai kesempurnaan. *Ketangi* dari kata “*tangi*” atau “*ngadeg*” (berdiri). Dari istilah inilah muncul nama *Kalang-adeg*, yaitu orang *Kalang* yang mengembara di hutan (*in de bosschen rondzwierpen*).¹³ Sementara itu, di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, ditemukan ratusan peti kubur batu yang terletak di lereng-lereng perbukitan di lahan hutan seluas 15 ha. Ini adalah kubur batu peninggalan orang *Kalang* yang pernah menghuni kawasan hutan ratusan tahun yang lalu. Kawengan berada tidak jauh dari Desa Kewangen, salah satu desa perdikan (*sima*) seperti yang disebut dalam Prasasti Canggal (1358 M) sebagai desa penyeberangan (*panambangan*) di aliran Bengawan Solo. Diduga, Perdikan Kewangen

diberikan kepada komunitas *Kalang* yang tinggal menetap dikawasan ini sejak zaman Majapahit. Mereka berusaha memanfaatkan *panambangan* ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makam *Kalang* semuanya mengarah timur-barat, yang dalam tradisi megalitik, arah timur menunjukkan kelahiran dan arah barat menunjukkan kematian. Secara simbolik, orientasi ini menggambarkan kelahiran kembali setelah kematian. Kubur *Kalang* di Kawengan mempunyai persamaan dengan kubur batu yang ditemukan di Gunung Kidul pada 1934. Di dalamnya ditemukan alat-alat dari besi seperti pahat, kapak persegi, cangkul, sabit, dll, yang biasa digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan hutan.

Menurut cerita rakyat setempat, *Kalang* adalah manusia purba yang belum mengenal agama besar, tetapi sudah mempunyai sistem kepercayaan sendiri. Pemujaan leluhur sangat kuat. Pandangan hidupnya sangat dipengaruhi paham *ancestor worship*, yang diungkapkan melalui upacara-upacara adat. Mereka mengakui adanya kesatuan tak terpisahkan antara Tuhan - leluhur - ego. Versi lainnya menyebutkan, *Kalang* adalah orang Jawa asli yang menolak masuk Islam lalu menyingkir ke hutan. Mereka mempercayai dewa-dewa asli seperti Sabdo Palon Naya Ginggong yang dipercaya sebagai penjelmaan sang Hyang Ismaya (Semar). Roh leluhur *Kalang* menjelma pada diri Sabdo Palon Naya Ginggong. Sebagai media pemujaan, diciptakanlah kesenian wayang Kerucil dengan tokoh utamanya Sabdo Palon Naya Ginggong.

Veth, misalnya, dengan mengutip bukunya de Jong menyebutkan, pada 1675 terdapat sejumlah besar orang *Kalang* yang dipekerjakan untuk menebang kayu di hutan, yaitu di pegunungan Rembang dan Pati.¹⁴ Daerah pegunungan antara Blora dan Bojonegoro merupakan salah satu pusat penting pemukiman mereka. Selanjutnya, de Jong menyatakan bahwa pada 1705 pernah diadakan perjanjian antara kompeni dan Sunan, yang menetapkan bahwa Sunan masih berhak menuntut sebagian tenaga orang *Kalang*, misalnya untuk membangun dan

memperbaiki perahu dan kapal-kapal serta untuk memenuhi kebutuhan kayu lainnya di kraton, tetapi orang Kalang tidak lagi menjadi kawula Sunan melainkan di

bawah kekuasaan kompeni.

Sunan juga tidak berhak lagi menarik pajak kepala dari orang Kalang. Orang Kalang sebagian besar tinggal di sepanjang pesisir utara: Surabaya, Pasuruan, Pati, Rembang, Demak, Kendal, Pekalongan dan Tegal, yang jumlahnya mencapai ribuan keluarga dan setiap keluarga harus membayar pajak kepala kepada Sunan. Pada 1761 jumlah pajak orang Kalang (*Kalangsgelden*) mencapai 2.830 ringgit.¹⁵

Tidak jelas benar apakah *Kalang* yang kemudian dibawa atau tinggal di Ibukota Mataram itu berasal dari *Kalang* di daerah Rembang, namun yang pasti, hutan menjadi habitus *Kalang* yang kemudian membentuk citra diri mereka bahwa Kalang sama dengan orang hutan (*wong alasan*). Dapat diduga bahwa mereka sebelumnya hidup secara nomaden di kawasan hutan dengan cara berburu dan meramu. Ketika di bawah kekuasaan raja-raja dan kompeni, *Kalang* tetap memiliki independensinya dalam memanfaatkan hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Berbekal keahlian yang dimiliki, *Kalang* sangat dibutuhkan oleh para penguasa untuk menebang hutan, memilih kualitas kayu yang baik, membuat bangunan karaton, peralatan pertanian, kapal, dan peralatan lain dari kayu. Baru setelah mereka dibawa ke keraton dan dijadikan abdi dalem, atau ketika mereka berada di bawah pengawasan kompeni pada abad ke-18, *Kalang* kehilangan kebebasannya dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan menjadi kelompok marjinal. Kompeni membebani mereka dengan pajak kepala (*hoofdgeld*) sebelum akhirnya pajak seperti ini dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Daendels.

Selain jejak arkeologis berupa peti kubur batu di wilayah perbukitan Kawengan Bojonegoro dan cerita rakyat, keberadaan *Kalang* sebagai satuan komunitas sulit dilacak. Hal ini terjadi

akibat dihapuskannya perbedaan antara penduduk *Kalang* dan bukan *Kalang* oleh Daendels pada awal abad ke-19, sehingga di pedesaan hutan di kawasan hutan Bojonegoro tidak ditemukan lagi kelompok *Kalang* yang hidup secara eksklusif. Meskipun demikian, sistem religi dan adat istiadat mereka tidak berarti mati sama sekali. Secara hipotetis, hal ini dapat ditemukan pada sistem kepercayaan dan aktivitas orang Samin, yang mempunyai kemiripan dengan *Kalang*. Salah satu pendapat mengatakan: "...orang-orang Samin mengikuti tradisi leluhurnya yang berasal dari Kalangan *Wong Kalang* di lembah Bengawan Sala..."¹⁶ Bukan suatu kebetulan pula bila desa-desa yang menjadi basis gerakan Samin di wilayah Blora dan Bojonegoro pada akhir abad ke-19 adalah desa-desa *Kalang*. Kepercayaan Saminisme sesungguhnya dapat dilihat sebagai reafirmasi dan ungkapan kembali sistem kepercayaan dan cara hidup *Kalang*. Seperti pengikut Samin, *Kalang* sangat independen dan sulit diperintah. Bila dugaan ini benar, maka dapat dikatakan ada hubungan erat antara *Kalang* dan pengikut Samin. Subbudaya *Kalang* yang berakar kuat pada tradisi Hindu/Buda mempunyai kemiripan dengan ajaran Samin yang mulai berkembang di pedesaan Blora pada akhir abad ke-19.

3.2. Pesanggem atau Mbaon

Pesanggem atau *Mbaon* adalah kelompok marjinal yang tinggal di wilayah hutan. Hidup mereka tergantung sepenuhnya pada hutan. Munculnya kelompok ini bersamaan dengan kegiatan peremajaan hutan jati yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda pada paro kedua abad ke-19 dengan sistem tumpangsari. Peremajaan hutan terus mengalami perluasan dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankannya. Peremajaan hutan dilakukan oleh penduduk setempat melalui sistem kontrak atau "tegal-kontrak" dan pengontraknya disebut "Petani Pesanggem", yaitu petani yang bersedia (*sanggem*) melakukan peremajaan hutan. Di pedesaan Blora, petani *Pesanggem* disebut dengan istilah *Mbaon*, terutama sejak

pengelolaan hutan jati berada di bawah Perhutani. Bila di zaman dulu Jawatan Kehutanan sulit memperoleh tenaga kerja (*Pesanggem*) karena letak hutan dan pemukiman penduduk berjauhan, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Petani yang ingin menjadi *Pesanggem* atau *Mbaon* sangat banyak, sementara luas lahan yang digarap semakin sempit. Dulu seorang *Pesanggem* bisa memperoleh bagian lahan garapan sekitar $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{3}{4}$ hektar, tergantung kemampuan seseorang, namun sekarang setiap *Pesanggem*, di Temulus Blora misalnya, hanya mendapat tanah garapan kurang subur sekitar 725 – 875 meter persegi. Lahan yang subur biasanya "dikuasai" oleh pegawai kehutanan, lalu dijual kepada para *mhaon* dengan harga tinggi. Untuk sekedar mendapat lahan garapan yang sempit, *Pesanggem* harus melakukan berbagai cara termasuk memberi upeti dan menyogok petugas kehutanan (mandor, mantri, polisi hutan).

Munculnya kelompok petani *Pesanggem* menandai terjadinya perubahan penting dalam masyarakat desa hutan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. *Pesanggem* merupakan kelompok petani marjinal yang memperoleh sumber penghidupan melalui kontrak kerja dengan Jawatan Kehutanan. Kegiatan utama mereka adalah melakukan peremajaan hutan, yang meliputi penyiapan lahan hingga memelihara tanaman muda sampai usia tertentu. Organisasi kerja mereka dikoordinasikan oleh pegawai Jawatan Kehutanan di bawah pengawasan mandor. Kontrak kerja tidak dilakukan secara kolektif di tingkat desa, tetapi secara individual sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sistem tegal-kontrak yang dilakukan petani *Pesanggem* lebih mirip dengan sistem buruh bebas. Petani bebas menentukan sendiri apakah ingin menjadi *Pesanggem* atau tidak; demikian pula luas lahan yang ingin dikerjakan juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan.

Munculnya *Pesanggem* sesungguhnya berkaitan erat dengan kebijakan kehutanan yang diperkenalkan pemerintah Kolonial

Belanda pada tahun 1865, yang secara substansial mengubah kepemilikan sumberdaya hutan. Paham lama yang menempatkan hutan sebagai milik komunal atau sebagai bagian dari paham *vorstdomein* digantikan oleh paham *staatsdomein*. Perubahan ini membawa implikasi luas terhadap pola penguasaan dan pemilikan lahan hutan oleh penduduk setempat. Persoalannya bukan hanya menyangkut hilangnya kebebasan memanfaatkan hutan, tetapi juga ancaman hilangnya sumber subsistensi bagi jaminan kelangsungan hidup. Dalam konsepsi masyarakat hutan, lahan dan hutan menjadi milik bersama sehingga pemanfaatannya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini terlihat jelas dalam pola pemilikan lahan yang ditemukan di Rembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pemilikan komunal atas lahan sawah lebih umum dikenal daripada pemilikan individual.

Pesanggem merupakan kelompok marjinal yang jumlahnya terus bertambah. Pada saat yang sama, lahan garapan mereka semakin sempit karena datangnya *Pesanggem* baru yang membutuhkan sumber penghidupan. Kelompok ini hingga sekarang masih eksis dan lebih populer disebut orang *Mhaon*. Istilah *Pesanggem* atau *Mhaon* untuk menyebut kelompok sosial yang sama: penduduk hutan yang menjadi petani penggarap di lahan hutan yang dikuasai pihak lain (pemerintah kolonial maupun Perhutani). Meskipun secara tradisional, lahan hutan adalah milik bersama dan secara turun temurun bebas mengusahakan dan mengambil hasilnya, namun sejak negara mengklaim menjadi penguasa atas hutan, penduduk setempat kehilangan hak-hak tradisionalnya dan bahkan kemudian menjadi buruh di atas lahannya sendiri. Meskipun lahan hutan itu tandus, tetapi lahan itu tetap menjadi rebutan petani marjinal di desa hutan.

Hidup *Pesanggem* sangat rentan terhadap perubahan yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan. Lebih khusus lagi, hidup mereka sangat tergantung pada para pegawai kehutanan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengendalikan kawasan hutan. Hidup *Pesanggem* selalu berada dalam tekanan: Sulit mendapatkan lahan garapan, dicurigai sebagai perusak atau pencuri hutan, dan diperalat oleh pegawai kehutanan untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, *Pesanggem* disuruh menebang kayu secara illegal dan hasilnya dibagi dua, yaitu untuk mandor dan dia sendiri. Namun, ketika *Pesanggem* ini tertangkap polisi hutan, ia dituduh sebagai pencuri dan harus diadili. Kelompok marjinal ini diperalat oleh para pegawai kehutanan dan dijadikan korban. Bila terjadi kerusakan dan kebakaran hutan, yang pertama-tama disalahkan adalah para *Pesanggem*. Mereka tidak mempunyai pelindung kecuali dirinya sendiri.

Pada tahun 1998 terjadi penjarahan hutan secara masif. Peristiwa penjarahan sendiri lebih sebagai bentuk perlawanan dan pelampiasan sesaat terhadap kondisi yang selama ini menekan penduduk miskin. Pengrusakan atau penebangan kayu secara massal pertama-tama bukan hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi melainkan sebagai bentuk “unjuk kekuatan” bahwa pendudukpun dapat bertindak seperti aparat hutan yang selama ini menekan mereka. Peristiwa penjarahan hutan tidak hanya dilakukan penduduk setempat, tetapi juga dilakukan oleh semua kalangan termasuk aparat kehutanan. Setelah penjarahan berakhir, keuntungan ekonomi yang diperoleh penduduk hutan tidak setimpal dengan tindakannya. Hutan yang menjadi sumber ekonomi justru mengalami rusak berat. Berbeda dengan gerakan massa yang terjadi di desa hutan lain di Jawa, penjarahan yang terjadi di Temulus (Blora) bukan untuk merebut “alat produk” (lahan hutan dijadikan miliknya) melainkan hanya menjarah “hasil produksi”, sehingga setelah peristiwa selesai, mereka tetap menjadi petani miskin yang hidupnya tergantung pada pihak lain.

Gerakan massa 1998 masih menyisakan trauma mendalam dan menjadi memori kolektif penduduk Temulus. Kekerasan fisik yang berujung melayangnya tiga warga desa di tangan aparat, penangkapan,

penyiksaan terhadap penduduk yang dicurigai menjarah hutan, telah memunculkan kesadaran baru bagi penduduk Temulus untuk bersikap kritis dan bahkan cenderung reaktif terhadap kebijakan Perhutani menyangkut pengelolaan hutan di sekitarnya. Misalnya, ketika Perhutani menerapkan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) pada 1999, sebagian penduduk desa hutan menolaknya. Program ini dianggap hanya rekayasa Perhutani untuk mengelabui penduduk dan kurang memberi keuntungan bagi mereka. Dari 33 desa yang ada di KPH Randublatung, Temulus adalah salah satu dari tiga desa yang tidak mau diajak kerjasama dengan Perhutani melalui program PHBM. Penduduk justru ingin mengembangkan program pelestarian hutan melalui model *Management Regime* (MR), yang intinya memberi keleluasaan penduduk mengelola lahan hutan yang. Sebidang lahan yang dikerjakan *Pesanggem* dibagi dua: separuh dijadikan lahan pertanian dan separuhnya lagi untuk tanaman kayu. Lahan yang diremajakan ini hasilnya juga harus dibagi dua sehingga penduduk juga menikmati hasil tanaman jati itu. Yang terjadi selama ini, *Pesanggem* hanya diijinkan menanam lahan hutan selama dua tahun dan tumpangsari dua tahun. Setelah itu mereka harus meninggalkan lahan itu dan membuka lahan yang baru lagi. Ini adalah model konvensional yang dianggap hanya menguntungkan Perhutani.

IV. SIMPULAN

Kalang dan *Pesanggem/Mbaon* merupakan kelompok pinggiran yang hidupnya sangat tergantung pada sumber daya hutan. *Kalang* adalah kelompok marjinal yang lebih dahulu mendiami kawasan hutan di wilayah pegunungan Kendeng dan sekitar Bengawan Solo. Dalam struktur masyarakat tradisional/kerajaan, *Kalang* dianggap kelas bawah atau pinggiran yang memiliki ciri-ciri fisik dan adat istiadat yang berbeda dengan penduduk Jawa lainnya. Stereotipe ini dibangun melalui mitos dan legenda yang diwariskan secara turun temurun sehingga sulit dihapuskan hingga sekarang. Peran *Kalang* di wilayah ini

cukup penting. Sejak masa kerajaan hingga masa kolonial, peran *Kalang* cukup menonjol. Para penguasa banyak memanfaatkan *Kalang* untuk berbagai keperluan, yaitu sebagai penebang hutan, tukang kayu, dan prajurit. *Kalang* juga menjadi objek penarikan pajak oleh kompeni. Meskipun *Kalang* sebagai kelompok sosial tidak lagi eksis, namun ada dugaan bahwa para pengikut ajaran Samin sesungguhnya adalah keturunan *Kalang*.

Sementara itu, kelompok *Pesanggem* atau *Mbaon* baru dikenal pada akhir abad ke-19. Mereka adalah petani miskin yang tidak memiliki modal produksi kecuali tenaga kerja. Perubahan kebijakan politik kehutanan telah mengakibatkan hilangnya hak-hak tradisional penduduk dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Hutan dikuasai negara dan penduduk tidak mempunyai kebebasan lagi memanfaatkan lahan hutan. Untuk bertahan hidup, mereka harus menjadi *Pesanggem* yang sepenuhnya berada di bawah perintah Dinas Kehutanan. Tekanan *Pesanggem* semakin berat ketika lahan menjadi semakin langka karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Akibatnya, hidup *Pesanggem* sangat rentan terhadap perubahan kebijakan kehutanan dan kerusakan hutan. Jadi, problem utama yang dihadapi petani hutan adalah persoalan penguasaan lahan hutan yang sekarang dikuasai negara. Mereka tetap beranggapan bahwa hutan adalah warisan nenek moyang dan harus dimanfaatkan secara bersama-sama. Problem *tenurial* inilah yang menjadi akar munculnya kelompok *Pesanggem* atau *Mbaon* di kawasan hutan daerah Rembang.

Kategori sosial di atas seringkali dapat dipandang sebagai bentuk kontinum dari satu kelompok/golongan ke kelompok lainnya. *Pesanggem* bertransformasi menjadi *Mbaon*, sementara *Kalang* berkembang atau berubah menjadi pengikut Samin. Seperti dikemukakan Prof Djoko Suryo, seperti sejarah Indonesia yang berada dalam tegangan dan dialektika kesinambungan dan perubahan, munculnya kaum marjinal di pedesaan hutan merupakan dialektika kesinambungan dan perubahan hubungan

antara alam, masyarakat, dan kebijakan politik.

CATATAN

¹ Disampaikan dalam Seminar Akademik “Historiografi Indonesia Modern”, untuk memperingati HUT ke-70 Prof. Dr. Djoko Suryo di FIB Universitas Gadjah Mada, 29 Desember 2009.

² Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989*, (Polity Press, 1990) Peter Burke, (ed.), *New Perspective on Historical Writing*, (Polity Press, 2001), hlm. 21.

³ Periksa; Arthur L. Stichcombe, *Theoretical Methods in Social History*, (Academic Press Inc, 1986), hlm. 186.

⁴ Lihat; Alun Munslow, *The New History*, (Pearson Education Ltd., 2003).

⁵ Periksa; Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

⁶ Selanjutnya disebut sebagai daerah Rembang saja

⁷ Graaf dan Pigeaud, 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa*, (Jakarta: grafiti Pers, 1985), hlm. 158-159

⁸ Altona, T., “Djati en Hindoe’s: Oorsprong van *Tectona grandis* L.f. op Java”. *Tectona*, deel XVI, (Buitenzorg: Archipel Drukkerij, 1923) hlm. 249.

⁹ Departemen Kehutanan, *Sejarah Kehutanan Indonesia I*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986), hlm. 21.

¹⁰ Veth, P.J., *Java: Geografisch, ethnologisch, historisch*, 3 jilid, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1903) hlm. 93; Jong, J.K.J. de & M.L. van Deventer (eds.), *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag in Oost-Indie*, (Amsterdam and The Hague: 1862-1909), hlm. 193.

¹¹ Departemen Kehutanan, 1986. *op. cit.*, hlm 33.

¹² Hoop, van der, 1935. "Kalangs en Kalang-Graven". *Het Bosch*, jg. III, Februari No. 1, 30, hlm. 30.

¹³ Altona, T., 1923, *op. cit.*, hlm. 250.

¹⁴ Jonge dan Deventer, 1862-1904, *op. cit.*, hlm. 193.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁶ Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin: Siapakah Mereka* (Jogjakarta: Penerbit Narasi, 2003), hlm. 23.